Jurnal

ISSN 2303 - 0313

MANAJEMEN &BISNIS

Kajian Ilmu Akutansi dan Manajemen Bisnis

Volume IV No 2 Desember 2018

KUALITAS AUDIT DAN KOMITMEN PROFESIONAL DALAM MENGELOLA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS DI BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH)
Henricus Raba, Edward Sindak Malau

KINERJA KEUANGAN DAERAH PASCA PERATURAN MINIMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Study Kasus di Lima Provinsi Pulau Jawa
Leonardus Budi Weluk,Yohanes Bosco Nambut

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PADA KINERJA PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI PEMODERASI
(studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI)
Eveline Mery

PENGARUH KINERJA AKUNTANSI PADA IKLIM ORGANISASI
(Study Kasus Pada PT X)
Ari Susanti, Alexander Poex Tjilen, Fransina

Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa, Merauke
Jl. Nusa Barong No.1 Merauke Papua 10130. Tel. (0971)3333501 Email: stie.theresa@gmail.com

ISSN 2303-0313

Jurnal

MANAJEMEN & BISNIS

Jurnal Manajemen dan Bisnis merupakan jurnal ilmiah bagi para ahli manajemen bisnis dan akuntansi. Isi dan konten jurnal ini berdasarkan hasil penelitian, kajian pustka dan analisa yang menggunakan metode ilmiah yang terukur.

Jurnal Manajemen dan Bisnis ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saint Theresa Merauke dengan jadwal penerbitan: dua kali dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember.

Pelindung : Badan Pengurus Yayasan LPK SaintTheresa

Penanggung jawab : Yohanes Ngamal, SE.,M.Si

Dewan Redaksi :

Ketua : Henricus Raba, SE.,M.M

Wakil ketua : Inez Cara A. Phoek, B.Com., M.M

Anggota : Leonardus Budi Weluk, S.Pd.,M.M

Fransiscus Saverinus Ngamel, S.Sos

Alamat Redaksi:

Jl. Nusa Barong, No.1, Merauke, Papua Tel. (0971)3333501

Email: stie.theresa@gmail.com

Sumbangan artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan Inggris, karya asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. Dapat dikirim melalui email ke alamat: stie.theresa@gmail.com Dewan redaksi mengedit dan menyunting tanpa mengubah substansi setiap artikel ilmiah yang dikirim penulis.

DAFTAR ISI ii

01 KUALITAS AUDIT DAN KOMITMEN PROFESIONAL DALAM MENGELOLA PERUSAHAAN (STUDI EMPIRIS DI BPKP PERWAKILAN JAWATENGAH)
Henricus Raba, Edward Sindak Malau

11 KINERJA KEUANGAN DAERAH PASCA PERATURAN MINIMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Study Kasus di Lima Provinsi Pulau Jawa
Leonardus Budi Weluk, Yohanes Bosco Nambut

23 PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN PADA KINERJA PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI PEMODERASI
(studi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI)

39 PENGARUH KINERJA AKUNTANSI PADA IKLIM ORGANISASI
(Study Kasus Pada PT X)
Ari Susanti, Alexander PoexTjilen, Fransina

KINERJA KEUANGAN DAERAHPASCA PERATURAN MINIMUM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Study Kasus di Enam Provinsi Pulau Jawa

Leonardus Budi Weluk, Yohanes Bosco Nambut

ABSTRACT

Keywords *: Pajak Bumi dan Bangunan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan yang terus berjalan mengharapkan perubahan yang bisa mengarahkan kepadaperbaikan sistem yang telah dilaksanakan. Salah satu perbaikan sistem yang dilakukan pemerintah sejak reformasi yaitu otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 1999. Otonomi daerah merupakan sistem desentralisasi pemerintahan supaya setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan sendiri untuk mengelola daerahnya. Pada kenyatannya, pelaksanaan otonomi daerah ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena setelah lebih dari satu dasawarsa masih banyak problematika pelaksanaan otonomi daerah. Problematika yang menjadi bahan renungan adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam membiayai wilayahnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Otonomi daerah yang terus berjalan tetap menjadi tugas pemerintah dalam perbaikan sistem. Perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui peraturan tentang Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut, pemerintah mengharapkan setiap daerah mampu membuat laporan neraca yang menggambarkan kekayaan daerah, sumber pendanaan serta laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menggambarkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Dana yang diperoleh dari pemerintah pusat serta surplus atau defisit yang dialami oleh suatu daerah, sehingga laporan tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 menggantikan UU No.18Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah prospek cerah bagi daerah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Sebagai contoh, setelah dikelola sejak 1 Januari 2011, Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi faktor utama dibalik meningkat tajamnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surakarta. Pada tahun pertama masuknya BPHTB (tahun 2011), pemerintah kota Surakarta menerima PAD yang awalnya sebesar Rp.114.329.357.815 meningkat menjadi Rp.176.176.060.000. Sedangkan pendapatan pajak daerah, pada tahun 2010 kota Surakarta sebesar Rp.54.423.668.000, tahun 2011 meningkat menjadi Rp.102.241.123.000 sehingga kontribusi BPHTB sebesar Rp.34.500.000.000. Dengan demikian, prosentase kenaikan pendapatan pajak daerah dari pemungutan BPHTB sebesar 88% dan jika tanpa kontribusi dari BPHTB, kenaikan pajak daerah kota Surakarta hanyalah mencapai 24%. Hal inilah yang menjadi **motivasi** penelitian, sehingga dapat diketetahui perkembangan kondisi setelah adanya kebijakan BPHTB tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan rasio-rasio tertentu dari Analisis Laporan Keuangan Daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan sampai pada tingkatan manakah pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan pembelanjaannya. Peralihan BPHTB sebagai pajak pusat menjadipajak daerah, tentu akan mengubah kinerja keuanganpemerintah daerah. Dengan demikian, **pertanyaan penelitian** ini adalah bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah dae- rah sebelum dan sesudah adanya minimmum Pajak Bumi dan Bangunan? Apakah ada perbedaan kinerja setelah peralihan minimum pajak tersebut? **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi PBB ke PAD sebagai salah satu sumber pendaan bagi pembiayaan pemerintah daerah yang berkontribusi memperlancar kegiatan otonomi daerah.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan **manfaat** bagi berbagai pihak berikut ini. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dengan tema sejenis yaitu kinerja keuangan daerah hubungannya dengan BPHTB. Kedua, hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah terutama mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pajak BPHTB.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Definisi otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 (5) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Unsur-unsur yang membentuk otonomi daerah adalah sebagai berikut.

Kewenangan Otonomi Luas

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalampenyelenggaraan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

Otonomi yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 (tiga) dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu sebagai berikut.

1) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3) Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutanlain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yangmenugaskan.

Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria penting lainnya untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 1, menyebutkan bahwa keuangan daerah

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, maka keuangan daerah digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan mengelola keuangan daerah, sebagai berikut ini (Nataluddin, 2001:167).

1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167).

1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.

2) Ketergantungan pada bantuan pusat harus minimal agar PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besarnya belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisis atas laporan tersebut merupakan informasi yang penting agar bisa membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga menunjukkan kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22).

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan "Hubungan Situasional" dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:168-169).

1) Pola Hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2) Pola Hubungan Konsultif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3) Pola Hubungan Partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampumelaksanakan urusan otonomi.
4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan melalui tabel 1.

Tabel 1
Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Tingkat Perkembangan	Pola Hubungan	Tingkat Otonomi Daerah
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif	Sangat Rendah
Rendah	25%-50%	Konsultatif	Rendah
Sedang	50%-75%	Partisipatif	Sedang
Tinggi	75%-100%	Delegatif	Tinggi

Sumber: Abdul Halim (2002:169)

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Abdul Halim, 2007: 232). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

Rasio Kemandirian :

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Jadi, semakin tinggi rasio Kemandirian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah

2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan.

Tabel
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Perkembangan	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 -10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : (Abdul Halim, 2007 : 234)

Ratio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

DDF = x 100%
Keterangan :
DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
PADt = Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t
TPDt = Total Penerimaan Daerah Tahun t

3) Ratio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahanya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

Tabel 3
Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 -20,00	Sangat Kurang
20,01 – 40,00	Kurang
40,01 – 60,00	Cukup
60,01 – 80,00	Baik
80,01 – 100	Sangat Baik

Sumber : (Adbul Halim, 2007 : 234)

Berikut rumus yang digunakan untukmenghitung Indeks Kemampuan Rutin.

IKR = X 100%

Keteragan :
IKR = Indeks Kemampuan Rutin
PAD = Pendapatan Asli Daerah

4) Ratio Keserasian

Ratio Keserasian adalah rasio untuk melihat keserasian antara belanja rutin terhadap APBD dan keserasian antara belanja pembangunan terhadap APBD. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk belanja rutin berarti prosentase belanja pembanguan yang digunakan untuk

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rumus rasio keserasian adalah sebagai berikut (Abdul Halim, 2007 : 235).

- Rasio Belanja Rutin :

$$= \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

- Ratio Belanja Pembangunan :

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

5) Ratio Pertumbuhan

Ratio pertumbuhan menggabarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dan meningkatkan keberhasilan yang di capai dari periode ke periode lainnya. pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusunan APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan (Abdul Halim, 2007 : 241).

Kondisi yang menunjukkan semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, dan Belanja Rutin yang diikuti semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Gambar 1 menunjukan kerangka konseptual masa sebelum dan setelah peralihan BPHTB.

Pengembangan Hipotesis

BPHTB yang beralih menjadi pajak daerah tentu akan meningkatkan PAD bagi daerah. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang tercermin dari rasio keuangan. Oleh karena itu hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

HI: Terdapat perbedaan kinerja keuangan setelah adanya peralihan BPHTB dari pusat ke daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/ kota di Pulau Jawa dengan metode pengumpulan data secara *purposive sampling*, yaitu sampel diperoleh dengan menggunakan kriteria tertentu, maka diperlukan suatu karakter yakni kabupaten/ kota yang sudah ada sejak otonomi BPHTB belum diperlakukan.

Data tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kabupaten/ kota sebagai dasar perhitungan kinerja keuangan untuk periode sebelum dan setelah peralihan BPHTB ke daerah berasal dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah setiap tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan data tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (DJPKPD). Periode pengamatan penelitian atas realisasi APBD adalah periode sebelum peralihan BPHTB (Tahun 2010) dan setelah peralihan BPHTB (Tahun 2011).

Definisi Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan kinerja antara dua sampel (sampel tidak bebas) dengan menggunakan alat uji statistik berupa uji beda. Dengan demikian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa parameter pengukuran yang berupa ratio pada tabel 4.

Tabel 4 Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukurann
1	Ratio Kemandiri-an Daerah	Ratio Kemandiriankeuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.	Ratio Kemandirian : $= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}}$
2	Ratio Derajat Desentralisasi Fiskal	Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembanguan	DDF $= \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$ Keterangan : DDF = Derajat Desentralisai Fiskal PADt = Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t TPDt = Total Penerimaan Daerah
3	Ratio Indeks Kemampuan Rutin	Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya.	IKR $= \frac{PAD}{Total\ Pengeluaran\ Rutin} \times 100\%$ Keteranga IKR = Indeks Kemampuan Rutin PAD = Pedapatan Asli Daerah
4	Ratio Keserasian	Rasio keserasian adalah rasio untuk melihat keserasian antara belanja rutin terhadap APBD dan keserasian antara belanja pembangunan terhadap APB.	Ratio Belanja Rutin : Total Belanja Rutin Total Belanja APBD Ratio Belanja Pembangunan : $\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{Total\ Belanja\ APBD}$
5	Ratio Pertumbuhan	Ratio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya.	r $= \frac{Pn-Po}{Po} \times 100\%$ Keterangan : Pn = Data yang dihitung pada tahun ke n Po = Data yang dihitung pada tahun ke 0 R = Pertumbuhan

Metode Analisis Data

Data penelitian ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis terlebih dahulu dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Hal ini karena normalitas diperlukan sebagai prasyarat untuk uji beda dari dua sampel yang berpasangan. Untuk mendeteksi normalitas data penelitian ini menggunakan uji nonparametrik yaitu *Kolmogorov-Smirnov*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel

Penelitian ini mengambil Pulau Jawa sebagai sampel penelitian karena Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang paling maju dalam hal pembangunan dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010 dan tahun 2011 dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu 117 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, terdapat tiga kabupaten yang belum ditemukan laporan realisasi anggaran untuk tahun 2010 yaitu Kota Depok, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, sehingga jumlah pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 114 pemerintah daerah. Adapun jumlah pemerintah daerah dari setiap provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat di tabel 5.

Tabel 5 Sampel Penelitian

No	Provinsi	Jumlah Pemda
1	DKI Jakarta	1
2	Jawa Barat	25
3	Jawa Tengah	34
4	Yogjakarta	6
5	Jawa Timur	39
6	Banten	9
Total		114

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa *mean* dari rasio kemandirian untuk tahun 2010 adalah 0,233 sedangkan untuk tahun 2011 meningkat menjadi 0,290. Sementara *mean* rasio derajat desentralisasi fiskal juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu 0,130 menjadi 0,152. *Mean* rasio indeks kemampuan rutin juga mengalami peningkatan yaitu 0,184 pada tahun 2010 dan 0,212 untuk tahun 2011. *Mean* rasio keserasian untuk belanja operasional mengalami penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu dari 0,843 menjadi 0,832 sedangkan untuk *mean* rasio keserasian belanja modal mengalami peningkatan yaitu dari 0,134 pada tahun 2010 menjadi 0,146 pada tahun 2011.

Nilai maksimum untuk rasio kemandirian yaitu 3,429 pada tahun 2011 dan 2,940 untuk tahun 2010. Nilai maksimum rasio tersebut merupakan nilai rasio dari Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jatim untuk tahun 2011 dan Pemprov Jabar untuk tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rasio suatu pemda, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai sendiri daerahnya. Pemprov Jatim dan Jabar mengalami peningkatan rasio kemandirian dari tahun 2010 ke tahun 2011 sehingga ada peningkatan kemampuan dalam membiayai daerahnya. Nilai minimum untuk rasio kemandirian pada tahun 2011 sebesar 0,001 sedangkan pada tahun 2010 sebesar 0,02. Pemda yang memiliki nilai rasio kemandirian terendah pada tahun 2011 adalah Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banten sedangkan untuk tahun 2010 adalah Pemkab Cimahi. Pemkab Banten mengalami penurunan nilai rasio kemandirian dari tahun 2010 ke tahun 2011, sehingga kemampuan dalam membiayai daerahnya sendiri mengalami penurunan. Sedangkan Pemkab Cimahi mengalami peningkatan dalam rasio kemandirian dari tahun 2010 ke tahun 2011.

Nilai maksimum untuk rasio derajat desentralisasi fiskal yaitu 0,774 untuk tahun 2011 dan 0,746 untuk tahun 2010. Nilai tersebut diperoleh dari Pemprov Jabar baik untuk tahun 2010 maupun tahu 2011. Pemprov Jabar memiliki kenaikan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan bahwa Pemprov Jabar memiliki kemampuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Menurut Halim (2007), nilai tersebut menunjukkan Pemprov Jabar memiliki kemampuan yang sangat baik. Nilai minimum untuk tahun 2011 sebesar 0,001 dan untuk tahun 2010 sebesar 0,019. Pemda yang memiliki nilai rasio untuk tahun 2011 adalah Pemkab Serang sedangkan untuk tahun 2010 adalah Pemkab Cimahi. Pemkab Serang mengalami penurunan dalam kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan. Menurut Halim (2007), nilai tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam hal keuangan daerah.

Nilai maksimum untuk rasio indeks kemampuan rutin pada tahun 2011 sebesar 1,511 dan 1,832 untuk tahun 2010, terjadi penurunan dalam nilai maksimum untuk rasio indeks kemampuan rutin dari tahun 2010 ke tahun 2011.Adapun daerah yang memiliki rasio indeks kemampuan rutin maksimum pada tahun 2011 adalah Pemprov Jateng dan untuk tahun 2010 adalah Pemprov Banten. Menurut Halim (2007), nilai tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membiayai pengeluaran operasional di daerahnya. Nilai minimum untuk rasio indeks kemampuan rutin pada tahun 2011 sebesar 0,0384 dan tahun 2010 sebesar 0,0334. Untuk tahun 2011, nilai minimum terdapat pada Pemkab Tasikmalaya dan tahun 2010 pada Pemkab Ngawi. Menurut Halim (2007), daerah tersebut memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran di daerahnya.

Nilai maksimum untuk rasio keserasian biaya operasional untuk tahun 2010 sebesar 1,000 yang diperoleh oleh Pemkot Tegal, sedangkan tahun 2011 sebesar 0,935 diperoleh Pemkot Yogyakarta. Nilai maksimum untuk rasio keserasian biaya modal tahun 2011 sebesar 0,327 diperoleh PemkotTangeran Selatan sedangan tahun 2010 sebesar 0,291 diperoleh Pemprov Banten. Nilai minimum untuk rasio keserasian biaya operasional pada tahun 2011 sebesar 0,473 diperoleh Pemprov Jateng sedangkan tahun 2010 sebesar 0,447 diperoleh Pemprov Banten. Nilai minimum untuk rasio keserasian biaya modal untuk tahun 2010 sebesar 0,038 diperoleh Pemkab Batang dan tahun 2011 sebesar 0,06 diperoleh Pemkot Yogyakarta.

Tabel 6 Descriptive Statistics

	N	Minumum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RK2011	114	.001643283919	3.429458005882	.27686933779175	.6135609011659l4
RK2010	114	.019731903968	2.940046761315	.23344406194461	.5290242311474385
RDDF2011	114	.001640587967	.774238744634	.14708184770826	.156692328991755
RDDF2010	114	.019350089853	.746195905638	.13052993659897	.144816322581110
RIKR2011	114	.038487807986	1.511079378062	.20702861627541	.275760823853968
RIKR2010	114	.033430030042	1.83230533929	.18475436436566	.287784599833798
RKI120011	114	.4735	.9350	.832187	.0751171
RKI2010	114	.447023200139	1.00000000000	.084360953268478	.086463891189030
RK22011	114	.059707415764	.3276733878246	.14617475001979	.054756214390315
RK22010	114	.038439186115	.291600678178	.13405825262020	.56465966231685
Valid N (listwise)	114				

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji apakah terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah yang lihat dari rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin dan rasio keserasian setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hasil pengujian menggunakan SPSS 16.0 dengan alat uji *paired sample t-test* menunjukkan hasil sebagai berikut pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Pengujian Hipotesis

Jenis Rasio	Nilai t	Signifikansi
Rasio Kemandirian	4,211	0,000
Rasio DDF	4,716	0,000
Rasio IKR	3,472	0,000
Rasio Keserasian - BO	-2,164	0,033
Rasio Keserasian- BM	2,839	0,005

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki perbedaan sebelum dan setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hasil tersebut diperoleh dengan melihat signifikasi dari setiap rasio, yaitu rasio kemandirian yang memiliki nilai t 3,502 dan nilai signifikansi 0,001, rasio derajat desentralisasi fiskal yang memiliki nilai t 3,687 dan nilai signifikansi 0,000, rasio indeks kemampuan rutin yang memiliki nilai t 3,302 dan nilai signifikansi 0,033, rasio keserasian untuk biaya operasional memiliki nilai t -2,164 dan nilai signifikansi 0,033 serta rasio keserasian untuk biaya modal memiliki nilai t sebesar 2,839 dan nilai signifikansi 0,005. Untuk setiap rasio nilai signifikasi kurang dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa setiap rasio menunjukkan nilai t yang positif kecuali untuk nilai t untuk rasio keserasian biaya operasional yang menunjukkan nilai negatif, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang tercermin dari rasio keserasian biaya operasional mengalami penurunan, artinya bahwa biaya operasional yang digunakan sebelum adanya peralihan BPHTB dari pemeritah pusat ke pemerintah daerah lebih besar daripada biaya operasional setelah adanya peralihan. Sedangkan keempat rasio yang lain mengalami peningkatan setelah terjadinya peralihan BPHTB.

Interpretasi Hasi Pengujian

Hipotesis penelitian ini dinyatakan dapat diterima dengan menggunakan alat uji *paired sample t-tes*, karena nilai signifikansi dari setiap rasio kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 2011.

Rasio yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio derajar desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian biaya operasional dan rasio keserasian untuk biaya modal. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masya-

rakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) diantanya melalui Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Abdul Halim, 2007: 232). Rata-rata rasio kemandirian pemerintah daerah di Pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011, hal tersebut menujukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah daripada sumber pendapatan dari pihak ekstern. Peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabakan peningkatan pendapatan asli daerah, karena BPHTB telah menjadi pajak daerah. Peningkatan kemandirian tertinggi dicapai oleh Pemkot Surabaya dengan peningkatan sebesar 58% dari tahun 2010 ke tahun 2011, sedangkan penurunan kemandirian tertinggi terjadi pada Pemkab Serang dengan penurunan sebesar 16%.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Peralihan BPHTB bisa menjadi salah satu upaya untuk menurunkan campur tangan pemerintah. Dari hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya peningkatan rasio derajat desentralisasi fiskal, peningatan rasio tertinggi dicapai oleh Pemkot Surabaya dengan peningkatan sebesar 20%, semntara penurunan tertinggi dialami oleh Pemkab Serang dengan penurunan sebesar 14%, rata-rata peningkatan rasio pemerintah daeerah di pulau Jawa sebesar 2%. Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah berubah setelah adanya peralihan BPHTB yang diukur melalui rasio derajat desentralisasi fiskal memberikan arti bahwa peralihan BPHTB merupakan salah satu cara untuk mengurangi campur tangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Akan tetapi, menurut Halim (2007) rasio derajat desentralisasi fiskal dikaatakan baik, jika berada pada range 0,4-0,5. Mean dari rasio derajat desentraliasasi fiskal untuk tahun 2010 adalah 0,13 dan tahun 2011 adalah 0,15 sehingga walaupun terjadi peningkatan rasio derajat desentralisasi fiskal tetapi belum bisa dikatakan baik masih dalam skala kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah pusat sepertinya perlu memindahkan pajak-pajak pusat ke pajak daerah agar ketergantungan daerah terhadap pusatsemakin rendah.

Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahanya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Hasil pengujian hipotesis menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki perbedaan dengan kinerja sebelum adanya pemerintah. Dari hasil statistik deskriptif juga menunjukkan adanya peningkatan mean dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hal tersebut menujukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dari pendapatan asli daerah semakin meningkat. Berdasarkan skala indeks kemampuan rutin dalam Halim (2007), pada tahun 2010 kinerja pemerintah dalam membiayai pengeluaran rutin berada pada kategori sangat kurang sedangkan tahun 2011 berada pada kategori kurang. Oleh karena itu, peralihan BPHTB masih belum bisa membuat kinerja indeks kemampuan rutin menjadi lebih baik. Sebagian besar pemerintah daerah memiliki kinerja yang meningkat untuk indeks kemampuan rutin, tetapi ada pula yang menagalami penurunan. Fenomena yang menarik terdapat pada Provinsi Banten, pemprov tersebut memiliki indeks kemampuan rutin yang tertinggi pada tahun 2010 tetapi rasio tersebut menurun drastis pada tahun 2011 yaitu menurun sebesar 0,5, penurunan yang cukup besar. Rata-rata kenaikan indeks kemampuan rutin hanya sebaesar 0,02. Akan tetapi, Pemprov Banten justru mengalami penurunan yang cukup besar. Hal tersebut karena terjadi kenaikan biaya operasional yang cukup besar pada tahun 2011 yaitu kenaikan sebesar 100%. Pemerintah daerah yang mengalami kenaikan rasio indeks kemampuan rutin tertinggi adalah Pemkab Tangerang Selatan. Biaya operasional Pemkab

Tangerang selatan memang menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011.

Rasio keserasian adalah rasio untuk melihat keserasian antara belanja rutin terhadap APBD dan keserasian antara belanja pembangunan terhadap APBD. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk belanja rutin berarti prosentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rasio keserasian untuk biaya operasional merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan total biaya APBD, sedangkan rasio keserasian untuk biaya pembangunan merupakan total biaya modal dibangingkan dengan total biaya ABPD. Rasio keserasian untuk biaya operasional di Pulau Jawa diantara 60-90% dari total biaya APBD sedangkan untuk rasio keserasian biaya modal diantara 10-40% dari total biaya APBD. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya operasional yang bersifat rutin lebih besar daripada biaya modal yang merupakan biaya pembangunan. Dari hasil pengujian hipotesis dinyatakan terdapat perbedaan kinerja antara rasio keserasian setelah adanya peralihan BPHTB ke pemerintah daerah. Dari rata-rata rasio keserasian terdapat peningkatan pada rasio belanja modal, sedangkan pada rasio belanja operasional menunjukkan adanya penurunan. Hal ini bisa dikatakan bahwa pada tahun 2011 belanja modal mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Penurunan rasio keserasian untuk belanja modal tertinggi adalah Pemkot Surabaya sedangkan peningkatan rasio keserasian untuk belanja modal tertinggi adalah Pemkot Banjar. Sedangkan untuk rasio keserasian untuk belanja operasional peningkatan rasio tertinggi adalah Pemkot Pekalongan dan penurunan rasio tertinggi adalah Pemkot Tegal. Pemerintah daerah di Pulau Jawa masih memiliki rasio keserasian untuk belanja operasional yang lebih tinggi dibandingkan untuk rasio keserasian belanja modal. Belanja di APBD masih didominasi oleh belanja-belanja yang sifatnya rutin, sedangkan untuk pembangunan masih relatif kecil.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dilihat dari rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin dan rasio keserasian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki perbedaan sebelum dan setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat diterima. Hasil pengujian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap rasio nilai t hasilnya positif kecuali untuk nilai t rasio keserasian biaya operasional yang menunjukkan nilai negatif, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang tercermin dari rasio keserasian biaya operasional mengalami penurunan, artinya bahwa biaya operasional yang digunakan sebelum adanya peralihan BPHTB dari pemeritah pusat ke pemerintah daerah lebih besar daripada biaya operasional setelah adanya peralihan. Sedangkan keempat rasio yang lain mengalami peningkatan setelah terjadinya peralihan BPHTB.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil analisis data.Keterbatasan pertama adalah penelitian ini menggunakan sampel kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa sehingga generalisasi hasil penelitian hanya terbatas pada wilayah tersebut. Namun demikian, penggunaan sampel pada wilayah tertentu ini dipilih karena dapat digunakan untuk mengendalikan pengaruh karakteristik wilayah yang berbeda-beda terhadap hasil penelitian.

Keterbatasan kedua adalah penelitian ini hanya menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dari sudut pandang pasca peralihan BPHTB pusat ke daerah sehingga generalisasi hasil penelitian hanya terbatas pada perubahan sistem tersebut. Meskipun demikian, penggunaan masa peralihan BPHTB sebagai perioda pengamatan

penelitian ini dipilih karena dapat mengurangi kemungkinan pengaruh "kemungkinan faktor-faktor/ kebijakan lainnya" pada hasil analisis.

Implikasi

Penelitian ini dapat memberi bukti empiris tentang perbedaan kinerja keuangan daerah pasca peralihan BPHTB dari pusat ke daerah khususnya Pulau Jawa. Hasil studi ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema sejenis, misalnya dengan mempertimbangkan:

1. Penggunaan sampel yang tidak hanya pemerintah daerah di Pulau Jawa tetapi seluruh Indonesia;
2. Menambahkan pengukuran kinerja misalnya rasio pertumbuhan; dan
3. Menelaah kembali rasio keserasian karena selain untuk belanja operasional dan belanja modal masih ada lagi pos dalam pengeluaran APBD yaitu pembiayaan dan transfer.

REFERENSI

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Ash Shiddiqy, Mohammad Hasby. 2012. *Analisis Perkembangan Kemampuan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul.* Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan).

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Natalludin. 2001. Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintaha Daerah di Provinsi Jambi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPYKPN.

Nirzawan. 2001. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara. *Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: UPP YKPN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pranicha, Herlin. 2011. *Analisis Rasio Keuangan APBD Tahun 2006-2009 Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.* Tugas Akhir Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (Tidak Dipublikasikan).

Prastowo, Dwi D. dan Rifka Julianti. 2002. *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi.* Edisi Revisi. Yogyakarta: AMPYKPN.

Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah. Manajemen Keuangan Daerah.Yogyakarta: UPP YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-keuangan-daerah-makalah.html.

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-otonomi-daerah-makalah.html.